

Jokowi dan Ma'ruf Amin Beserta Seluruh Menteri Tak Akan Mudik

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta semua pejabat tidak akan MUDIK Lebaran 2021. Hal ini diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat untuk mematuhi larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah.

"Presiden Joko Widodo bersama semua menteri, wakil presiden, semua kepala lembaga itu tidak akan mudik atau pulang kampung karena mereka semua akan memberikan teladan kepada masyarakat untuk tidak pulang kampung atau mudik Lebaran," kata Staf Khusus Presiden Jokowi bidang komunikasi, Fadjoel Rachman, dalam Instagram Live-nya seperti dilihat, Minggu (18/4).

Fadjoel sendiri mengaku sudah memesan tiket untuk mudik ke Kalimantan Selatan. Namun perjalanan itu akhirnya dibatalkan karena mudik Lebaran 2021 dilarang.

"Saya sendiri sebenarnya sudah mau pulang kampung, sudah mau mudik, saya sudah beli tiket. Sudah beli tiket dan terus kemudian Presiden Joko Widodo melalui Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendy, dilarang mudik 6-17, akhirnya saya dengan istri membatalkan tiket pulang. Jadi tidak jadi pulang tidak jadi berlebaran di Kalimantan Selatan," ujar Fadjoel.

Selain itu, kata Fadjoel, Jokowi juga sudah memberikan arahan kepada semua menteri untuk tidak menggelar buka bersama. Larangan juga berlaku untuk open house.

"Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan kepada semua menteri koordinator semua menteri dan semua kepala lembaga termasuk pejabat negara, termasuk tentu saja ASN, BUMN TNI Polri kementerian koordinator, kementerian dan lembaga tidak boleh mengadakan puasa bersama, jadi kita juga di kantor tidak boleh buka puasa bersama karena sudah dilarang presiden," tutur Fadjoel.

Jokowi sebelumnya mengatakan tujuan pemerintah melarang mudik untuk menekan penularan Covid-19. Sebab, 4 libur panjang sebelumnya mengakibatkan terjadi kenaikan kasus korona.

"Ramadhan tahun ini adalah Ramadhan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4). ● han

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan yang Rusak di Bima

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, Pusat Zeni AD akan membantu memperbaiki tiga jembatan yang rusak akibat terjerangan bencana banjir bandang di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu.

"Kami siapakan segera kirim ke Tanjung Priok. Ingat pengerjaan jembatan harus mandiri," ujar KSAD, Sabtu (17/4).

Andika mengatakan, pengerjaan secara mandiri oleh Pusat Zeni AD mulai dari lampu, alat berat dan semua peralatan yang dibutuhkan harus dibawa sekaligus. Berbagai alat dan keperluan untuk memperbaiki tiga jembatan yang rusak akibat banjir bandang akan dibawa menggunakan Kapal Angkatan Darat Republik Indonesia (ADRI).

Sebelum mengirimkan

bantuan ke Bima, KSAD terlebih dahulu menerima laporan dari Panglima Kodam IX Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak terkait kondisi terakhir di daerah itu.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat M Noer menyampaikan terima kasih atas bantuan TNI AD yang telah bersedia membantu memperbaiki akses publik tersebut.

"Terima kasih atas gerak cepat TNI AD dalam menangani jembatan yang putus," katanya.

M Noer mengatakan jembatan yang putus tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan berlalu lintas hingga akses menuju desa-desa terpencil. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Selasa (13/4) ada 178 korban jiwa akibat bencana banjir bandang di NTT dan 48 orang hilang. ● han



IDN/ANTARA

PAMERAN DIRGANTARA DI BALI

Pegiat olahraga dirgantara terbang dengan "paramotor" saat kegiatan Pameran Dirgantara di kawasan Keramas, Gianyar, Bali, Minggu (18/4). Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengenalkan dan memberikan edukasi tentang dunia kedirgantaraan kepada masyarakat.

BPIP Susun Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk ASN

JAKARTA (IM) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyusun peta jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Peta ini juga untuk memetakan pola, bentuk dan sumber terbentuknya perilaku menyimpang ASN dari nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan PIP dibahas melalui diskusi yang dilaksanakan Direktorat Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara Kedepuan Pengkajian dan Materi BPIP. BPIP menampung masukan terkait hal ini.

"Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait proyek perubahan yang dilakukan BPIP melalui penyusunan peta jalan PIP bagi ASN atau pandu ASN," kata Direktur Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara (SMAN) BPIP Aris Heru Utomo, Minggu (18/4).

Dia berharap nantinya bisa dipetakan pola, bentuk, dan sumber terbentuknya perilaku menyimpang

ASN mempunyai panduan dalam menjawab tantangan di era disrupsi.

"ASN diharapkan bersikap agile dan adaptif menghadapi perubahan nasional dan global serta persaingan yang tidak lagi linear, termasuk godaan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain," ungkap Aris.

Menurutnya, ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara. Pasalnya, selain jumlahnya yang besar, mereka tersebar di semua sektor birokrasi di kementerian ataupun lembaga, termasuk di dunia pendidikan.

Dia menilai ASN memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di pusat dan daerah. Sebagai guru dan dosen, ASN juga berperan penting dalam mencerdaskan generasi muda. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RUMAH PENDIRI NU DI KEDIRI

Pengunjung melintas di depan rumah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari di kawasan Pondok Pesantren Kapurejo, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (17/4). Rumah kuno yang pernah digunakan sebagai tempat pertemuan sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan tersebut masih terawat dan difungsikan sebagai tempat santri mengaji.

Tak Ada Materi Pancasila, Ketua MPR Minta PP Standar Pendidikan Direvisi

MPR RI mendorong agar pendidikan Pancasila kembali menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No. 57

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebab dalam PP tersebut disebut tidak memuat pendidikan Pancasila

sebagai pelajaran wajib bagi siswa SD sampai mahasiswa.

"Mata pelajaran pendidikan Pancasila harus menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Hilangnya mata pelajaran pendidikan Pancasila sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional telah merupukan pondasi bangsa akibat ketidakpahaman generasi bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (18/4).

Menurut Bamsoet –panggilan Bambang Soesatyo – sebelum pendidikan Pancasila dihilangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan tersebut telah menjadi pelajaran wajib sejak tahun 1975. Hal ini tak lepas dari peran MPR RI melalui TAP MPR 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983.

"MPR RI saat ini tengah mendorong agar pendidikan Pancasila kembali menjadi mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan. Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tidak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera," lanjutnya.

Berdasarkan hasil survei LSI tahun 2018, dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah menurun sekitar 10%. Pada 2005 masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2% sedangkan pada 2018 75,3%.

Sementara survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda dengan responden usia 18-25 tahun di 34 provinsi, tercatat hanya 61% responden yang merasa yakin dan setuju nilai-

nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

"Seiring cepatnya laju roda zaman dan lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang dibungkus dalam bingkai modernitas, tantangan merawat dan menjaga Pancasila semakin nyata. Bila kita lalai dan abai, nilai-nilai asing yang masuk dengan deras ke Indonesia pada akhirnya akan merongrong jati diri, tradisi dan budaya, moralitas serta warisan kearifan lokal bangsa," jelasnya.

Ia menyarankan salah satu upaya menghadirkan nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan. Pendidikan UID NRI Tahun 1945 menyatakan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu setiap warga negara tanpa memandang apapun berhak mendapatkan pendidikan bermutu, termasuk pendidikan Pancasila.

"Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai. Bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Tetapi juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada setiap diri orang Indonesia," tandasnya. ● han

3 Kader Terlibat Korupsi Proyek Indramayu, DPP Golkar: Kader Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA (IM) – Tiga kader Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar). DPP Partai Golkar menegaskan bahwa kader yang terlibat korupsi harus bertanggung jawab.

"Bagi Partai Golkar, siapa pun kader yang terlibat dalam perkara korupsi, harus bertanggung jawab atas tindakannya," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (17/4).

Ace mengatakan Golkar prihatin dengan peristiwa itu. Menurut dia, ketiga kader Golkar yang terjerat kasus korupsi itu bersikap kooperatif saat melakukan pemeriksaan.

"Kami sangat prihatin atas kasus hukum yang terjadi atas 3 orang yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus Banprov di Kabupaten Indramayu. Sejauh yang kami amati, ketiga orang tersebut kooperatif terhadap proses hukum di KPK. Kasus ini merupakan kasus lama dan terjadi tahun 2018 yang lalu," katanya. DPP Partai Golkar, kata Ace, telah mengambil tindakan tegas. Salah satunya menonaktifkan salah satu tersangka, yaitu Ade Barkah, sebagai Ketua DPD Golkar Jabar. "DPP Partai Golkar kan sudah mengambil sikap terkait

dengan status Ade Barkah yang telah dinonaktifkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sejak tanggal 9 Februari 2021 yang lalu, jauh hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka," kata dia.

"Sejak 9 Februari 2021 pelaksanaan tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat telah diberikan kepada saya untuk menjalankan roda organisasi dan melakukan konsolidasi organisasi di Jawa Barat ini. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen Partai Golkar dalam pemberantasan korupsi dan menjaga maruah Partai Golkar," ujarnya.

Sebelumnya, 3 kader Golkar terjerat kasus korupsi proyek di Indramayu. Terbaru, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap. Penetapan mereka menambah daftar kader Golkar yang terseret pusaran kasus korupsi proyek pekerjaan di Kabupaten Indramayu melalui dana bantuan provinsi (banprov). Sebelum menetapkan Ade Barkah dan Siti Aisyah sebagai tersangka, KPK lebih dulu menetapkan Abdul Rozzaq Muslim sebagai tersangka. Mantan anggota DPRD Jabar itu pun sudah disidang di pengadilan. han

Bakamla RI Peringatkan Kapal Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

BATAM (IM) - Kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, KN Singa Laut 402 memberi peringatan kepada kapal tanker asal Yunani karena mondar-mandir di perairan Maluku.

Informasi ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (18/4), menyatakan, Kapal Bakamla itu mendapat informasi dari Puskodal Bakamla RI, terdapat kapal asing berbendera Yunani yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada Kamis (15/4).

Kapal dengan nama lambung MT MGD tersebut memasuki wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, tepatnya di perairan Maluku, dengan arah haluan yang berubah-ubah.

"Berdasarkan informasi tersebut, KN Singa Laut 402 yang sedang berpatroli di perairan Maluku langsung bergerak menuju titik koordinat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal target MT MGD," demikian keterangan pers yang diterima, Minggu (18/4).

Pada Jumat (16/4) sekitar pukul 8.00 WTI, kapal Bakalma itu mendeteksi keberadaan kapal tersebut dengan haluan utara dengan cepat 4,7 knots. Komandan KN Singa Laut 402 Letkol Bakamla Hermawan memerintahkan pendekatan hingga jarak 200 yards guna melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut dengan radio komunikasi. Diketahui, MT MGD melaksanakan lintas laut dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menuju Australia.

Namun terlihat haluan kapal MT MGD yang tidak sesuai dengan tujuan dan mondar-

mandir di ALKI III, dengan alasan menyesuaikan waktu ketibaan di Australia.

Kegiatan itu menimbulkan kecurigaan petugas di kapal patroli Bakamla, karena perilaku kapal tersebut memiliki potensi mengganggu lalu lintas pelayaran di ALKI.

Menanggapi hal tersebut, dengan tegas KN Singa Laut 402 memerintahkan untuk mengubah haluan ke selatan dan langsung berlayar menuju tujuan Australia tanpa berhenti atau berputar-putar di ALKI III. MT MGD langsung mengubah haluan sesuai yang diperintahkan dan meninggalkan perairan Maluku menuju perairan Australia.

Puskodal Bakamla RI melaksanakan pemantauan terus-menerus terhadap gerakan kapal tersebut hingga keluar dari ALKI III dan memasuki perairan Australia. ● mei

DPR: Uji Klinik Vaksin Nusantara Tidak Ada Urusan dengan Nyawa ...

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyatakan, uji klinis fase II vaksin Nusantara tidak memiliki urusan dengan nyawa manusia Indonesia secara keseluruhan. Ia menegaskan, uji klinis fase II vaksin Nusantara hanya diikuti oleh relawan yang sudah bersedia menjadi objek dalam uji klinis vaksin tersebut.

"Uji klinis ini tidak ada urusan nyawa manusia Indonesia seluruhnya, urusannya sama para relawan yang sudah taruh badannya untuk mau ikut uji klinis, relawannya saja mau diuji klinis dengan sekian risikonya," kata Melki, Sabtu (17/4).

Melki menuturkan, para relawan yang mengikuti uji klinis fase II vaksin Nusantara pun telah diberi penjelasan mengenai vaksin tersebut dan tidak mengalami paksaan. Oleh karena itu, Melki mengaku heran apabila Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempersoalkan uji klinis tersebut.

Menurut politikus Partai Golkar itu, BPOM baru boleh mempersoalkan jika vaksin

Nusantara digunakan untuk masyarakat umum melalui adanya emergency use authorization (EUA).

"Jadi maksud saya Badan POM aneh karena untuk diuji klinis tahap II ini kan bukan kita pakai untuk masyarakat publik gitu lho, kalau untuk EUA yang jutaan dosis sih mungkin kita begini okelah," katanya.

Sebagaimana diketahui, uji klinis fase kedua vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM. Melki bersama sejumlah anggota DPR pun menjadi relawan pengembangan vaksin Nusantara.

Sampel darah mereka diambil di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4). Padahal, berdasarkan data studi vaksin Nusantara, tercatat 20 dari 28 subjek atau 71,4 persen relawan uji klinis fase I mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dalam grade 1 dan 2.

Kepala BPOM Penny Lukitio mengatakan, relawan mengalami kejadian yang tidak

diinginkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant 500 mcg.

"Dan lebih banyak dibandingkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant 250 mcg dan tanpa adjuvant," kata Penny, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (14/4).

Penny mengatakan, KTD pada relawan antara lain nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penbalan, kemerahan, gatal, ptechiea, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal.

Menurut Penny, KTD grade 3 terjadi pada pada 6 subjek. Rinciannya, satu subjek mengalami hipernatremi, dua subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN) dan tiga subjek mengalami peningkatan kolesterol.

Penny menjelaskan, KTD grade 3 merupakan salah satu kriteria untuk menghentikan pelaksanaan uji klinis sebagaimana tercantum pada protokol. Namun, tim peneliti tidak melakukan penghentian uji klinis. ● mei



IDN/ANT

AKSI GOWES UNTUK DEMOKRASI DI MYANMAR

Sejumlah peserta unjuk rasa bertajuk "Gowes for Democracy #SaveMyanmar" bersepeda di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (17/4). Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kecaman atas kudeta ilegal dan menuntut agar militer Myanmar (Tatmadaw) segera mengakhiri kekerasan serta mengembalikan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar.



PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk.

PENGUMUMAN

PENGANTARAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dengan ini disampaikan bahwa terhitung tanggal 15 April 2021 Perseroan telah menunjuk Bpk Ruben Partogi sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru, menggantikan Bpk Budiman Pramono Sidi yang telah berakhir masa tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 052/SK-DIR/LCKGK/2021 tanggal 15 April 2021.

Selanjutnya, semua alamat korespondensi yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan harap dialamatkan kepada:

Bpk Ruben Partogi
Sekretaris Perusahaan
PT. LCK Global Kedaton Tbk
Komplek Perkantoran Cempaka Mas Blok M No 64
Jln Letjen Suprpto, Jakarta Pusat 10640

Jakarta, 19 April 2021
Direksi Perseroan